

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha	15
1. Pengertian Umum tentang Persaingan Usaha	15
2. Pengaturan Tentang Hukum Persaingan Usaha	16
B. Tinjauan Umum tentang Persekongkolan dan Persekongkolan Tender	18
1. Pengertian Umum Tentang Persekongkolan	18
2. Tinjauan Umum tentang Persekongkolan Tender	21
C. Tinjauan Dasar Pengaturan Persekongkolan Tender	22
1. Dasar Pengaturan Persekongkolan Tender Indonesia	22
2. Dasar Pengaturan Persekongkolan Tender Australia	33
D. Tinjauan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha	44

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	44
2. <i>Australian Competition and Consumer Commission</i>	51
E. Pendekatan Persekongkolan Tender	61
1. <i>Per se Illegal</i>	62
2. <i>Rule of Reason</i>	63
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	67
B. Jenis Penelitian	68
C. Teknik Pengumpulan Data	71
 BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Perbandingan Pengaturan Persekongkolan Tender dan Lembaga Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia dan di Australia	74
1. Persamaan dan Perbedaan dalam Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per Se Illegal</i>	76
2. Persamaan dan Perbedaan Lembaga Pengawasan Persaingan Usaha	80
B. Perbandingan Penanganan Kasus Terkait Persekongkolan Tender Horizontal Di Indonesia Dan di Australia	86
1. Perbandingan dalam Pembuktian Persekongkolan Tender	86
1.1 Pembuktian Persekongkolan Tender di Indonesia	87
1.2 Pembuktian Persekongkolan Tender di Australia	96
2. Perbandingan dalam Alat Bukti Persekongkolan Tender	99
2.1 Alat Bukti Persekongkolan Tender di Indonesia	99
2.2 Alat Bukti Persekongkolan Tender di Australia	105
3. Perbandingan dalam Pembebanan Sanksi Terhadap Persekongkolan Tender	108
3.1. Pembebanan Sanksi Terhadap Persekongkolan Tender Indonesia	108
3.2. Pembebanan Sanksi Terhadap Persekongkolan Tender Australia	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 124